

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas pokok permasalahan mengenai perbedaan persepsi Cina dan Amerika Serikat dalam Permasalahan di Tibet Tahun 2008 mencakup alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar teori, hipotesa, jangkauan penelitian dan metode penelitian. Dalam konteks ini, akan mengungkap keseluruhan upaya penyelesaian dan kendala masalah kemanusiaan di Tibet.

A. Alasan Pemilihan Judul

Kekuasaan pemerintah Cina atas Tibet merupakan hubungan panjang dan berliku. Pendudukan Tibet di bawah kekuasaan Cina diawali pada masa Dinasti Tang (618-907) di abad ke-17, Dinasti Yuan dari abad ke-13 hingga abad ke-14, Dinasti Ming (1368-1644), Dinasti Qing atau Manchu (1644-1911), hingga revolusi tahun 1911 menghancurkan Dinasti Qing dan melahirkan Republik China. Sepanjang periode Republik Cina (1911-1949), pemerintah yang berganti-ganti dengan berbagai konflik politik yang ada membuat Cina kurang memberikan perhatiannya pada Tibet. Tibet sebenarnya sudah dapat dikatakan menikmati status merdeka secara *de facto*. Kesempatan tersebut dimanfaatkan pemerintah Cina untuk menduduki Tibet. Proses pendudukan Tibet oleh Cina tidak mendapatkan perlawanan yang berarti. Pemerintah Tibet pada saat itu tidak memiliki sarana untuk melawan secara militer, dan upaya meminta bantuan pada masyarakat internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika

Serikat, India, dan Inggris gagal mendapatkan tanggapan. Akibatnya tidak ada pilihan lain bagi Tibet. Penandatanganan “Tujuh Poin Kesepakatan” pada 23 Mei 1951, menandai peresmian Tibet menjadi bagian wilayah integral Cina.¹

Alasan *de facto* yang dulu pernah disandang mengawali perjuangan kemerdekaan Tibet untuk melepaskan diri dari Cina. Dari sinilah pergolakan politik pada Mei 2008 yang disikapi secara represif dan anarkis oleh pemerintah Cina melahirkan bentuk pelanggaran hak asasi manusia berupa hak integritas pribadi seperti; perlindungan terhadap pembunuhan, hukuman mati secara gegabah, penyiksaan, perlakuan sewenang-wenang dan lain-lain.

Menariknya, Amerika Serikat khususnya di bawah kepemimpinan George W. Bush era 2004-2009 memiliki kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan Tibet di bawah pemerintah Cina. Kontribusi besar tersebut diwujudkan dalam bentuk pengangkatan isu pelanggaran hak asasi manusia di Tibet oleh media massa Amerika Serikat, diberlakukannya Cina sebagai negara pelanggar hak asasi manusia dalam Kongres Amerika Serikat 7 Desember/Resolusi 483, sebagai fasilitator, negosiator dan bantuan teknis dana.

Disisi lain perbedaan mendasar perspektif hak asasi manusia antara Amerika Serikat dan Cina dalam mengupayakan resolusi bagi tragedi kemanusiaan Tibet 2008 menjadi menarik untuk diteliti, sebab perbedaan diantara keduanya menghambat terjadinya persamaan persepsi dalam mengatasi masalah tersebut.

¹ Nurani, Soyomukti. 2008. *Revolusi Tibet: Fakta, Intrik, dan Politik Kepentingan Tibet-Cina-Amerika Serikat*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Halaman 41.

A. Tujuan Penulisan

1. Mengungkap hambatan Cina dan Amerika Serikat dalam upaya mencari resolusi bagi permasalahan Tibet tahun 2008 atas perbedaan persepsi hak asasi manusia diantara keduanya.
2. Menerapkan ilmu yang diperoleh selama duduk di bangku kuliah dalam bentuk karya ilmiah sesuai disiplin ilmu yang dipelajari.

B. Latar Belakang Masalah

Berita pergolakan Tibet tanggal 10 Maret 2008 merupakan aksi menuntut pemisahan diri dari Cina. Pergolakan politik atas tuntutan “Tibet Merdeka” yang dewasa ini kembali merebak tidak terlepas dari serangkaian perlawanan tahun 1959. Gejolak aksi unjuk rasa besar-besaran di beberapa Kawasan Otonomi Tibet (*Tibet Autonomous Region/TAR*) dalam waktu berdekatan tersebut membuat pemerintah Cina mengambil tindakan keras untuk meredam demonstran. Akibatnya jumlah korban akibat pergolakan politik Cina dan Tibet terus meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan pantauan terbaru *Human Right Situation in Tibet: Annual Report 2009* diketahui 267 orang menjalani hukuman pidana, 943 orang menjalani hukuman tahanan politik dan 154 orang ditangkap secara resmi.² Sebagian fakta jumlah korban yang terungkap dalam tindakan keras yang diambil oleh pemerintah Cina dalam mengatasi pergolakan politik di Tibet tersebut diatas mempresentasikan aksi yang dinilai melanggar hak asasi manusia oleh pihak Amerika Serikat.

² *Human Right Situation in Tibet: Annual Report 2009*, www.tchrd.org.htm, 14 Mei 2010.

Bukti pelanggaran Cina terhadap hak asasi manusia di Tibet 2008 dalam dokumentasi situs www.american.gov antara lain: perampasan hak hidup, penangkapan sewenang-wenang, menghilangnya tahanan politik, penyiksaan dan penindasan tahanan politik, kondisi buruk penjara Tibet, kecurangan peradilan, penindasan kebebasan berbicara, berpidato, bersuara, berbudaya, beragama, berekspresi dan bermedia pers.³

Tindakan represif dan anarkis pemerintah Cina atas tragedi kemanusiaan di Tibet 2008 dalam prespektif Amerika Serikat membuktikan buruknya penghargaan atas hak asasi manusia sekaligus bertentangan dengan *Bill of Rights* (1798) bahwa hak asasi manusia pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari *Declaration of Independence* yang disusun oleh Thomas Jefferson yang menyatakan bahwa “ *We hold trust to be self indent, that all men created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and pursuit of happiness...*”⁴

Konsep dasar diatas tersebut menjadi pertimbangan utama keterlibatan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan George W. Bush untuk turut andil dalam menciptakan resolusi tragedi kemanusiaan Tibet 2008.

Keterlibatan George W. Bush dalam upaya penegakan hak asasi manusia di Tibet berdasarkan keputusan Kongres Amerika Serikat 7 Desember 2004/resolusi 483 yang menyatakan Cina sebagai negara pelanggar hak asasi manusia. Hal tersebut ditentang keras oleh Hu jintao yang menyatakan bahwa permasalahan Tibet 2008 sebagai masalah separatisme dan bukan permasalahan hak asasi

³ *China (includes Tibet, Hong Kong, and Macau) 2008 Country Reports on Human Rights Practices*, www.american.gov, dipublikasikan Februari 2009, 13 Mei 2009.

⁴ *Encarta Encyclopedia Deluxe 2009*, CD-Rom Programmer By Microsoft Inc, 2009.

manusia⁵. Keseriusan Amerika Serikat tersebut direalisasikan dalam bentuk fasilitator dan negosiator, penyanggah dana kemanusiaan dan mempublikasikan perkembangan hak asasi manusia melalui media online.

Secara keseluruhan upaya Amerika Serikat di bawah kepemimpinan George W. Bush dalam mengupayakan resolusi atas tragedi kemanusiaan di Tibet 2008 mengalami kendala. Perbedaan mendasar pemahaman dan pelaksanaan hak asasi manusia Cina dan Amerika Serikat menjadi pemicu keduanya belum menemukan resolusi tepat bagi Tibet atas pergolakan politik yang kini tengah berlangsung. Dalam kaitan itu, Cassese menyatakan bahwa:

*Amerika Serikat memahami hak asasi manusia sebagai hak asasi manusia yang tertanam dalam individu dan merupakan faktor intrinsik dalam kualitas diri manusia, karenanya lebih dulu adanya daripada tatanan negara dan karena itu secara mutlak harus dihormati oleh pemerintah. Disisi lain Cina memahami hak asasi manusia itu hanya ada dalam manusia itu hanya ada dalam masyarakat dan dalam negara sebatas sampai kemana ia harus diakui secara khusus. Hak asasi manusia itu tidak ada sebelum negara, akan tetapi diberikan oleh negara.*⁶

Fakta membuktikan arah ketidakterhasilan Cina-Amerika Serikat dalam mengupayakan resolusi atas perbedaan persepsi hak asasi manusia periode 2004-2009 dan perkembangan terkini yakni:

Pertama, memburuknya catatan kemanusiaan Cina seperti persoalan penindasan terhadap warga Tibet, aktivis hak asasi manusia, pemberangusan pers dan hukuman mati dalam laporan mekanisme tinjauan ulang pembahasan oleh Dewan Hak Asasi Manusia, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) 9 februari 2009 dengan

⁵ *China Janjikan Perbaikan HAM*, www.mediaindonesia.com, 13 Juni 2009.

⁶ Antonio, Cassese. 2005. *Hak-hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesi. Halaman 71.

negara anggota seperti Zimbabwe, Iran, Kuba, Srilangka, Burma, dan Sudan.⁷

Kedua, perundingan-perundingan yang dilakukan secara sporadis dalam dasawarsa terakhir gagal mencapai kemajuan.⁸

Ketiga, nyaris tidak ada kesepakatan selama delapan kali babak pembicaraan antara pejabat Cina dan utusan Dalai Lama.⁹

Berdasarkan fakta dan kendala yang mengungkap perbedaan persepsi antara Cina dan Amerika Serikat dalam mengupayakan resolusi isu kemanusiaan di Tibet 2008 diatas maka menjadi menarik untuk mengungkap sejauh mana keduanya mampu menginterpretasikan informasi yang sama dengan cara berbeda.

C. Rumusan Masalah

Mengapa upaya penyelesaian masalah kemanusiaan di Tibet yang dilaksanakan Cina dan Amerika Serikat sulit dicapai?

D. Kerangka Dasar Teori

Konsep yang digunakan dalam menganalisa permasalahan perbedaan persepsi antara Cina dan Amerika Serikat dalam isu kemanusiaan di Tibet 2008 adalah Teori Persepsi.

Teori Persepsi

Dalam kaitan teori persepsi, Mas'ood menyatakan bahwa persepsi adalah sistem keyakinan, citra atau model tentang dunia yang dianut oleh seseorang membantunya berorientasi terhadap lingkungan, mengorganisasikan persepsi

⁷ Laporan Tinjauan Ulang HAM di Tibet, www.mediaindonesia.com, 13 Juni, 2009.

⁸ Obama Serukan Perundingan Cina-Dalai Lama, www.matanews.com, 4 Mei 2010.

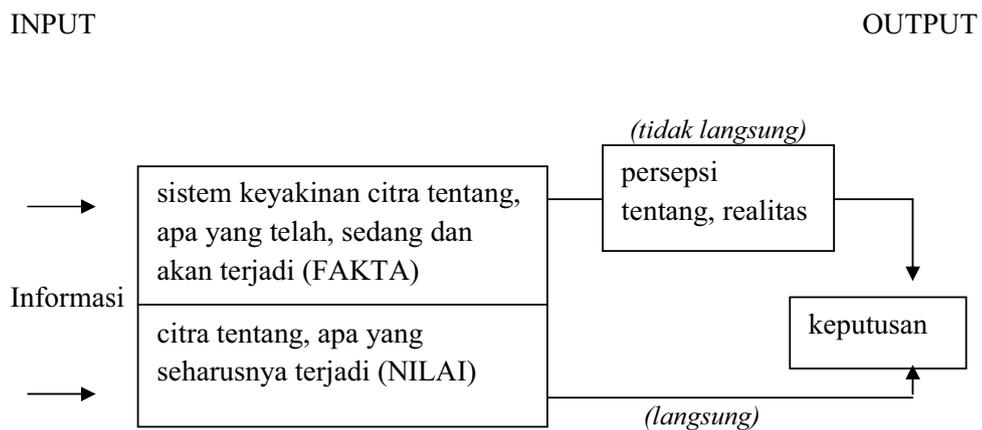
⁹ Obama tak Lunak Soal Cina, www.matanews.com, 4 Mei 2010.

sebagai penuntun tindakan, menentukan tujuan dan bertindak sebagai saringan dalam menyeleksi informasi dalam setiap situasi.¹⁰

Untuk menganalisa permasalahan perbedaan persepsi antara Cina dan Amerika Serikat dalam isu kemanusiaan di Tibet 2008 digunakan diagram Ole R. Holsti yang menggambarkan persepsi dan hubungannya dengan citra dan sistem keyakinan seperti terlihat dalam gambar.

Gambar I

Hubungan antara Sistem Keyakinan dengan Pembuat Keputusan Politik Luar Negeri



Sumber: Oleh R. Holsti, "The Believe System and National Images: A Case Study", dikutip dalam Bruce Russet and Harvey Starr, World Politics, (Now York: Freeman, 1985), halaman 304.

Dalam teori persepsi diawali dengan nilai dan keyakinan yang membantu menetapkan dan menentukan arah perhatiannya dan stimulus. Berdasarkan sikap dan citra yang telah dipegangnya selama ini, stimulus diinterpretasikan. Dalam hal ini terdapat dua citra, yaitu terbuka dan tertutup. Citra yang terbuka menerima semua informasi yang baru, walaupun mungkin bertentangan dengan citra yang

¹⁰ Mohtar, Mas' oed. 1989. *Studi Hubungan Internasional, Tingkat Analisis dan Teorisasi*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial UGM. Halaman 22.

dipegangnya selama ini, dan menggabungkannya dengan citra yang telah dipegang atau bahkan kalau perlu merubah citra yang sudah dianut itu agar cocok dengan kenyataan. Citra tertutup, karena alasan-alasan psikologik, menolak perubahan dan karenanya mengabaikan saja informasi yang bertentangan dengannya dan memilih bagian-bagian tertentu dari informasi yang masuk yang bisa dipakai untuk mendukung citra yang telah ada. Persepsi, yang didasarkan pada citra yang sudah ada sebelumnya, adalah proses seleksi. Sistem keyakinan adalah sekumpulan keyakinan, citra, atau model tentang dunia yang dianut oleh seseorang. Sistem keyakinan terdiri dari serangkaian citra yang membentuk keseluruhan kerangka acuan atau sudut pandang seseorang. Citra-citra itu meliputi realitas masalalu, masakini dan realitas yang diharapkan dimasa depan, dan preferensi nilai tentang apa yang ‘seharusnya terjadi’.¹¹ Sistem keyakinan itu membantunya berorientasi terhadap lingkungan, mengorganisasikan persepsi sebagai penuntun tindakan, menentukan tujuan dan bertindak sebagai saringan dalam menyeleksi informasi dalam setiap situasi.

Tahap selanjutnya berupa proses pembuatan keputusan melalui interpretasi terhadap informasi pada sistem keyakinan dan citra yang dimiliki oleh pembuat keputusan itu. Dalam hal ini bisa terjadi mispersepsi, yaitu ketika perilaku negara atau pembuat keputusan negara itu dipandang secara berbeda dengan apa yang sebenarnya mereka lakukan atau ketika maksud mereka diinterpretasikan secara berbeda dengan yang sebenarnya mereka maksudkan. Mispersepsi seperti ini seringkali mempengaruhi politik luar negeri. Dalam hal ini mekanisme juga

¹¹ *Ibid*, halaman 21.

dipengaruhi oleh persepsi selektif. Yaitu proses dan mekanisme psikologik yang diterapkan oleh para pembuat keputusan untuk memproses informasi dan menyeleksinya berdasar citra yang dipegang.¹²

Mekanisme Persepsi Selektif

Terdapat tiga tahap dalam mekanisme persepsi selektif yakni *konsistensi kognitif* yaitu agar berbagai citra yang mereka pegang tidak saling bertentangan *the evoked set* yaitu pembangkitan kembali kenangan akan peristiwa yang telah terjadi di masa lalu dan *wishful thinking* yaitu proses dengan mana seseorang secara sadar atau tidak menginterpretasikan suatu fakta sedemikian rupa sehingga sesuai dengan keinginan dan keyakinannya.

Mispersepsi dan Politik Luar Negeri

Mispersepsi seringkali mempengaruhi politik luar negeri suatu negara. Hal tersebut dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, pembuat keputusan luar negeri seringkali kurang memperhitungkan kemungkinan bahwa pesan, pidato, atau komunikasi lain yang mereka sampaikan diterima dengan jelas oleh orang lain (walaupun sudah diusahakan se jelas mungkin). Kedua, para pembuat keputusan itu seringkali tidak menyadari bahwa perilaku mereka mungkin tidak menunjukkan apa yang sebetulnya ingin mereka komunikasikan.

Fakta pergolakan politik di Tibet 2008 adalah perjuangan kemerdekaan diri Negeri Atap Putih dari Cina. Sikap pemerintah Cina yang dinilai represif dan anarkis dalam meredam gejolak perjuangan kemerdekaan diri tersebut mengundang Amerika Serikat untuk turut andil dalam mencari resolusi bagi

¹² *Ibid.*, halaman 22.

permasalahan Tibet. Dalam proses pemecahan masalah Tibet 2008 antara Cina dan Amerika Serikat mengalami kendala perbedaan perspektif pemahaman dan pelaksanaan hak asasi manusia antara keduanya. Berikut analisa permasalahan perbedaan persepsi antara Cina dan Amerika Serikat dalam isu kemanusiaan di Tibet 2008 dengan fokus penelitian pada level analisa individu yakni kepemimpinan antara Cina di bawah kepemimpinan Hu Jintao dan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan George W. Bush dalam aplikasi diagram Ole R. Holsti yang menggambarkan persepsi dan hubungannya dengan citra dan sistem keyakinan.

Analisa kepemimpinan aplikasi teori persepsi Ole R. Holsti diawali dengan model kepemimpinan Hu Jintao dan George W. Bush. Model kepemimpinan Hu Jintao selama menjabat sebagai presiden Cina periode 2004-2009 hal pemaknaan, pemahaman dan pelaksanaan hak asasi manusia dalam konflik di Tibet melalui pendekatan relativist. Cina memahami hak asasi manusia itu hanya ada dalam masyarakat dan dalam negara sebatas sampai kemana ia harus diakui secara khusus. Hak asasi manusia itu tidak ada sebelum negara, akan tetapi diberikan oleh negara.¹³ Pendekatan relativist Cina dalam menerapkan standar hak asasi manusia mempertimbangkan keragaman sejarah bangsa, kehidupan sosial, budaya dan realitas politik yang ada pada negara tersebut¹⁴. Pendekatan relativist memahami hak asasi manusia bukan sesuatu yang sifatnya universal tapi terkait

¹³ Antonio, *loc. cit.*,

¹⁴ Seymour, James D. 1994. "Human Rights in China," *Current History*, September. Academic Research Library. Halaman 203.

dengan norma budaya¹⁵. Dalam melihat hak sipil dan politik, Cina menggunakan pendekatan-pendekatan relativisme budaya. Relativisme budaya merupakan pemahaman yang ada pada level ideosentrik individu yang merupakan hasil pengalaman dalam memahami dunia. Inti dari relativisme budaya adalah ketika apa yang dikatakan dan dikerjakan dilakukan atas nama budaya. Pemaknaan, pemahaman dan pelaksanaan hak asasi manusia di Cina juga dipengaruhi oleh ajaran Konfusianisme yang memahami bahwa hak asasi manusia tidak sebagai penghormatan atas individu, tetapi lebih kepada pendekatan-pendekatan kelompok atau komunitarian¹⁶. Mengenai hak dan kewajiban, Cina memegang prinsip hukum bahwa antara hak dan kewajiban adalah satu kesatuan. Berdasar prinsip tersebut, Cina kemudian mengimplementasikan bahwa hak asasi individu bisa disubordinasikan ketika berhadapan dengan kewajiban untuk mendukung kepemimpinan nasional¹⁷. Pemikiran berbeda terjadi pada model kepemimpinan George W. Bush selama menjabat sebagai presiden Amerika Serikat periode 2004-2009 dalam pemahaman dan pelaksanaan hak asasi manusia dalam konflik di Tibet tidak dapat dipisahkan dari Demokrasi Barat yang merujuk pada Magna Charta, *The English Petition of Rights*, *The English Bill of Rights*, *The Two Treaties of Government*, dan Deklarasi Kemerdekaan Amerika (*The Declaration of Independence*), dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai formulasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Pada intinya Amerika Serikat memahami hak asasi manusia sebagai hak asasi

¹⁵ Moore, Greg. 2008. "Chinas Caution Participation in the UN Human Rights Regime", *Human Rights and Human Welfare*, vol 1, no 1, 2001, halaman 23-29, <http://www.ciaonet.org/journal>, 30 Maret 2008.

¹⁶ Seymour, *loc.cit.*,

¹⁷ Seymour, *op.cit.*,

manusia yang tertanam dalam individu dan merupakan faktor intrinsik dalam kualitas diri manusia, karenanya lebih dulu daripada tatanan negara dan karena itu secara mutlak harus dihormati oleh pemerintah¹⁸.

Keyakinan yang dianut oleh Hu Jintao dan George W. Bush memiliki keterkaitan erat atas keputusan kebijakan luar negeri yang diambil. Model kepemimpinan Hu Jintao dalam pemaknaan, pemahaman dan pelaksanaan hak asasi manusia atas konflik Tibet sebagai permasalahan separatisme dan bukan permasalahan hak asasi manusia dilihat dari sejarah pendudukan Cina atas Tibet. Cina memandang Tibet sebagai bagian dari wilayah integralnya yakni atas penandatanganan Tujuh Poin Kesepakatan pada 23 Mei 1951 yang menegaskan peresmian bergabungnya Tibet dengan Republik Rakyat Cina (*People's Republic of China*). Model kepemimpinan George W. Bush dalam pemaknaan, pemahaman dan pelaksanaan hak asasi manusia Cina atas konflik Tibet atas tindakan represifnya dalam upaya meredam pergolakan politik bersebrangan dengan ideologi Amerika Serikat yang menghormati, menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dan memformulasikannya sebagai bagian kebijakan keluar negeri Amerika Serikat. Keseriusan Amerika Serikat dalam memperjuangkan supremasi hukum hak asasi manusia di Tibet direalisasikan dalam bentuk fasilitator, negosiator, penyandang dana teknisi, keuangan, pembentukan badan koordinasi khusus dan beberapa program demokratisasi. Hal tersebut diresmikan dalam keputusan Kongres Amerika Serikat 7 Desember/Resolusi 483.

¹⁸ Antonio, *op.cit.*,

Sifat kepemimpinan Hu Jintao dan George W. Bush berperan besar dalam merefleksikan sebuah pemerintah terutama dalam pembuatan keputusan politik luar negeri hal konflik Tibet. Sifat kepemimpinan Hu Jintao selama menjabat sebagai presiden Cina periode 2004-2009 dalam memahami konflik Tibet sebagai masalah separatisme tidak terlepas dari ideologi dan sifat kepribadian. Hu Jintao merupakan penganut ideologi Marxist yang tidak mengakui dan atau menghapus hak milik pribadi¹⁹, nilai Konfusianisme yang menekankan pada pentingnya unsur kolektif dibanding unsur individu²⁰ dan ideologi Mao yang lebih mementingkan politik dan ekonomi dalam kebijakan-kebijakannya. Faktor ideosentrik memiliki kontribusi besar dalam pengambilan keputusan Hu Jintao atas konflik Tibet. Faktro ideosentrik tersebut meliputi kebiasaan Hu Jintao menjalankan politik konservatif, memiliki karakter kuat, cerdas, disiplin, mengatasi masalah dengan *win-win solution*, memiliki loyalitas tinggi pada negara dan kesetiaan yang dibuktikan selama ini dengan pengabdianya pada Partai Komunis Cina (PKC) dari tahun 1984-1985 sebagai jabatan Sekretaris Pertama Liga Pemuda Komunis Cina dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Cina 1992-sekarang serta kiprahnya di dunia Militer Cina dari Ketua Kimisi Militer Pusat Partai Komunis Cina 2004-sekarang sehingga, mempengaruhi keputusannya yang menyatakan bahwa hak asasi manusia di Tibet adalah masalah separatisme dan bukan masalah hak asasi manusia. Sifat kepemimpinan George W. Bush selama menjabat sebagai presiden Amerika Serikat periode 2004-2009 dalam memahami konflik Tibet sebagai pelanggaran hak asasi manusia terkait erat dengan faktor ideologi dan faktor

¹⁹ *Maoisme*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia>, 14 Februari 2011.

²⁰ *Empat Prinsip Kardinal*, <http://www.wikipedia.org/&rurl>, 4 januari 2011.

idiosentrik. Faktor ideologi yakni sebagai penganut realis sejati²¹ yang menekankan pada moral sebagai fungsi politik dan teori perdamaian demokratik (*democratic peace theory*) yang menekankan mengatasi resolusi konflik tanpa kekerasan²². Faktor ideosentrik meliputi latar belakang lingkungan keluarga militer, pribadi disiplin, bertanggung jawab, berkarakter keras, memiliki kapabilitas bisnis yang baik, bebas, mandiri, emosional dan konservatif dalam hal insting politik dan kepemimpinannya. Fakta ideosentrik dan sistem kepemimpinannya berkaitan erat dengan sikap keras George W. Bush yang dibuktikan dengan kecaman kerasnya terhadap tragedi kemanusiaan di Tibet dan keseriusannya dalam upaya menegakkan supremasi hukum hak asasi manusia di daerah konflik tersebut.

Proses pencitraan dari Hu Jintao dan George W. Bush juga turut menentukan pemaknaan, pemahaman, dan pelaksanaan hak asasi manusia di masing-masing negara. Pemilihan proses pencitraan tertutup dipilih Hu Jintao dalam menyikapi konflik di Tibet dimaksudkan agar tidak perlu merubah citra yang telah dianutnya agar cocok dengan kenyataan. Pencitraan tertutup dalam pemaknaan, pemahaman dan pelaksanaan hak asasi manusia di Cina dibawah kepemimpinan Hu Jintao dalam upaya mempertahankan Tibet sebagai bagian dari wilayah integralnya dibuktikan dengan pemilihan bagian-bagian informasi tertentu yang masuk untuk digunakan sebagai pendukung citra yang telah ada. Bukti pemilihan informasi tertentu yang masuk untuk mendukung citra tertutup Hu Jintao dengan tetap

²¹ Budiono, Kusmohamidjojo. 1987. *Hubungan Internasional: Kerangka Studi Analisa*. Binacipta. September, halaman 18-19.

²² Asrudin Center (Staff Peneliti di Asosiasi Riset Opini Republik Indonesia), *Kritik Terhadap Teori Perdamaian Demokratik*. www.wordpress.com, 8 Agustus 2009.

bersikeras bahwa Tibet sebagai bagian dari integralnya dengan mengabaikan, menolak atau menyanggah informasi yang menyatakan bahwa tindakan kerasnya di Tibet adalah tindakan pelanggaran hak asasi manusia serta sikap kerasnya dalam sejumlah perundingan kemanusiaan Tibet yang di fasilitasi oleh Amerika Serikat. Fakta membuktikan dari sejumlah agenda perundingan yang terjadi sejak periode 2004-2009 gagal mencapai kemajuan²³, nyaris tidak ada kesepakatan selama delapan kali babak pembicaraan antara pejabat Cina dan Dalai Lama²⁴ dan memburuknya catatan kemanusiaan Cina dalam laporan mekanisme tinjauan ulang pembahasan oleh Dewan Hak Asasi Manusia, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 9 Februari 2009.²⁵ Pemilihan proses pencitraan tertutup juga dipilih George W. Bush dalam menyikapi konflik di Tibet turut memiliki kontribusi besar dalam menentukan sikapnya. Pencitraan tertutup dalam pemahaman dan pelaksanaan hak asasi manusia yang digunakan George W. Bush dalam upaya memperjuangkan penegakan supremasi hukum hak asasi manusia di Tibet di buktikan dengan pemilihan bagian-bagian informasi tertentu yang masuk untuk digunakan sebagai pendukung citra yang telah ada. Bukti pemilihan informasi tertentu yang masuk untuk mendukung citra tertutup George W. Bush dengan tetap bersikeras bahwa Cina sebagai negara pelanggar hak asasi manusia dalam konflik di Tibet dan mengabaikan informasi dari pihak Cina yang menanggapi reaksi kongres Amerika Serikat mengenai tindakannya yang dinilai represif pada hari Senin 7 April 2008, China menentang resolusi itu.

²³ Obama Serukan Perundingan Cina-Dalai Lama, *loc. cit.*,

²⁴ Obama tak Lunak Soal HAM, *loc. cit.*,

²⁵ Laporan Tinjauan Ulang HAM di Tibet, *loc. cit.*,

Dalam menyikapi konflik Tibet pemerintah Cina di bawah kepemimpinan Hu Jintao dan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan George W. Bush berupaya menyaring informasi melalui keputusan secara selektif. *Pertama*, Hu Jintao memilih konsistensi kognitif untuk menggabungkan bentuk pemahaman dan pemikiran hak asasi manusia relativist sebagai upaya untuk menghindari pertentangan dalam negeri agar sesuai dengan sistem pemerintahannya yang menekankan pemaknaan, pemahaman dan pelaksanaan hak asasi manusia mempertimbangkan keragaman sejarah bangsa, kehidupan sosial, budaya dan realitas politik yang ada pada negara tersebut²⁶ serta memilih pembangkitan kenangan dengan masa jabatan atau karier mengabdikan sebagai anggota PKC (Partai Komunis Cina) dan militer, dan menginterpretasikan keinginan dan keyakinannya untuk mempertahankan Tibet sebagai bagian dari wilayah integral Cina maka Hu Jintao secara tegas menyatakan bahwa konflik di Tibet adalah masalah separatisme dan bukan masalah hak asasi manusia. George W. Bush memilih konsistensi kognitif untuk menyatakan Cina sebagai negara pelanggar hak asasi manusia dalam konflik di Tibet dipilih agar tidak bertentangan dengan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi demokrasi yang memformulasikan hak asasi manusia sebagai bagian penting kebijakan luar negerinya, memilih pembangkitan kenangan bebas dan mandiri yang menyinggung kehidupan damai dan menginterpretasikan keinginan dan keyakinannya untuk memperjuangkan supremasi hukum hak asasi manusia di Tibet melalui fasilitator, negosiator, penyandang dana teknis, keuangan, pembentukan badan koordinasi khusus Tibet, dan beberapa program

²⁶ Seymour, *loc.cit.*,

demokratisasi. Sedang konsistensi kognitif Amerika Serikat di bawah kepemimpinan George W. Bush yang menyatakan Cina sebagai negara pelanggar hak asasi manusia dalam konflik di Tibet dipilih agar tidak bertentangan sekaligus menghindari pengubahan citranya sebagai negara penganut sistem demokrasi yang memformulasikan hak asasi manusia sebagai bagian penting kebijakan luar negerinya. *Kedua*, pembangkitan kembali kenangan atau peristiwa yang telah terjadi di masa lalu (*the evoked set*) ditempuh oleh Hu Jintao dalam menyikapi konflik Tibet. Hal tersebut tidak lepas dari kontribusi Hu Jintao selama ini yang memulai karir dan mengabdikan diri sebagai anggota PKC (Partai Komunis Cina) dan militer. Hu Jintao sebagaimana diketahui terkait jabatannya sebagai Sekretaris Pertama Liga Pemuda Komunis Cina 1984-1985, Sekretaris Komite Provinsi Tibet 1988-1992, dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Cina 1992-sekarang, memiliki peran penting dalam aneksasi atau pendudukan Tibet di bawah kekuasaan Cina. Latar belakang militer Hu Jintao sebagai Ketua Komisi Militer Pusat Partai Komunis Cina 2004-sekarang dan Ketua Komisi Militer Pusat Republik Rakyat Cina 2005-sekarang yang dimiliki menuntut loyalitas dan nasionalitas tinggi Hu Jintao untuk turut serta menentukan pemikirannya mempertahankan Tibet sebagai bagian dari wilayah integral Cina. Pembangkitan kembali kenangan atau peristiwa yang telah terjadi di masa lalu (*the evoked set*) ditempuh oleh George W. Bush dalam menyikapi konflik Tibet. Hal tersebut tidak lepas dari kontribusi George W. Bush yang memiliki sikap bebas dan mandiri sebagaimana pidato yang menyinggung kehidupan damai dan berdampingan antara Israel dan Palestina. Bush tidak menekankan ancaman teror terhadap

Amerika, namun lebih pada demokrasi yang bisa diterapkan di tempat lain karena ini adalah resep mujarab untuk keamanan dan perdamaian²⁷. *Ketiga*, Proses Secara Sadar atau Tidak Menginterpretasikan Fakta Sehingga Sesuai dengan Keinginan dan Keyakinannya (*Wishful Thinking*). Untuk menginterpretasikan keinginan dan keyakinannya untuk mempertahankan Tibet sebagai dari wilayah integral Cina maka Hu Jintao secara tegas menyatakan bahwa konflik di Tibet adalah masalah separatisme dan bukan masalah hak asasi manusia. Hal tersebut juga diperkuat dengan “Buku Putih” yang dalam pernyataannya menegaskan kepemilikan Cina atas Tibet²⁸. Untuk menginterpretasikan keinginan dan keyakinannya menyatakan bahwa Cina sebagai negara pelanggar hak asasi manusia dalam konflik Tibet maka George W. Bush duwujudkan dalam upaya nyata memperjuangkan supremasi hukum hak asasi manusia yang direalisasikan dalam bentuk fasilitator, negosiator, penyandang dana teknisi, keuangan, pembentukan badan koordinasi khusus Tibet, dan beberapa program demokratisasi.

Dalam proses pengambilan keputusan luar negeri terkait konflik di Tibet baik oleh pihak Cina di bawah kepemimpinan Hu Jintao dan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan George W. Bush menimbulkan pesan yang tidak diterima jelas oleh kedua belah pihak. Hal tersebut disebabkan dua hal yakni pembuatan keputusan luar negeri seringkali kurang memperhitungkan kemungkinan bahwa pesan, pidato, atau komunikasi lain yang mereka sampaikan diterima jelas oleh orang lain dan para pembuat keputusan seringkali tidak menyadari bahwa perilaku

²⁷ Pidato Kenegaraan Presiden George W. Bush; *Pasukan Amerika Serikat di Irak Akan Lebih Mendukung Saja*, <http://www.rnw.nl/node/100>, 8 Agustus 2008.

²⁸ Nurani, *op.cit.*, halaman 39.

mereka tidak menunjukkan apa yang sebetulnya mereka ingin komunikasikan. Pernyataan Hu Jintao atas kebijakan luar negerinya hal pemilihan atas reaksi terhadap konflik Tibet dalam pernyataan bahwa masalah Tibet sebagai separatisme pada tanggal 12 April tahun 2008²⁹ dan tanggal 22 April 2008³⁰ mengeluarkan pernyataan mengenai janji akan menghormati dan melindungi hak asasi manusia, keterlibatan dalam rezim internasional serta penandatanganan sejumlah Kovenan kemanusiaan tidak menjadikan penghormatan hak asasi manusia di Cina menjadi lebih baik. Sikap dan perilaku Hu Jintao yang menggunakan citra tertutup dalam menyikapi masalah di Tibet dalam pernyataan diatas serta keterlibatan dalam rezim internasional dan penandatanganan sejumlah ratifikasi kemanusiaan tidak menjadikan penghormatan atas hak asasi manusia di Cina menjadi lebih baik. Fakta membuktikan pemerintah Cina di bawah kepemimpinan Hu Jintao hingga saat ini belum belum mampu mewujudkan upayanya menghormati dan melindungi hak asasi manusia terhadap konflik Tibet. Hal tersebut diperkuat dengan memburuknya catatan kemanusiaan Cina seperti penindasan terhadap warga Tibet, aktivis hak asasi manusia, pemberangusan pers dan hukuman mati dalam laporan mekanisme tinjauan ulang pembahasan oleh Dewan Hak Asasi Manusia, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) 9 Februari 2009 dengan negara anggota seperti Zimbabwe, Iran, Kuba, Srilangka, Burma, dan Sudan.³¹ Hal mispersepsi dalam politik luar negeri George W. Bush yang kurang memperhitungkan kemungkinan bahwa pesan, pidato, atau komunikasi lain yang mereka sampaikan diterima jelas oleh orang Cina atas keputusannya karena tidak

²⁹ Presiden Cina Nilai Kasus Tibet Bukan Masalah HAM, www.mediaindonesia.com, 3 Juni 2009.

³⁰ Cina Janjikan Perbaikan HAM, www.mediaindonesia.com, 3 Juni 2009.

³¹ *Laporan Tinjauan Ulang HAM di Tibet, loc. cit.*,

menyadari bahwa perilakunya yang tidak menunjukkan apa yang sebetulnya ingin dikomunikasikan atas reaksi terhadap konflik Tibet dalam upayanya memperjuangkan hak asasi manusia. Kebijakan luar negeri terkait sejumlah aliran dana, sikap, perilaku dan pelaksanaan hak asasi manusia George W. Bush tidak merefleksikan nilai demokrasi yang menjunjung tinggi tanggung jawab moral terkait aliran dana rahasia Amerika Serikat bagi Tibet, diantaranya berupa dana rahasia Amerika Serikat-Tibet sebesar \$ 5000 dan dana rahasia Tibet sebesar \$ 5.000 periode 14 Desember 2005³² serta pendanaan bagi blogger Tsering Woesser yang dianggap Cina telah melansir pemberitaan yang dapat memicu kesatuan integral dalam aliran dana periode 30 Maret 2009³³.

E. Hipotesa

Upaya penyelesaian masalah kemanusiaan di Tibet 2008 yang dilakukan pemerintah Cina dan Amerika Serikat sulit dicapai karena adanya perbedaan persepsi dalam hal pemaknaan, pemahaman dan pelaksanaan hak asasi manusia.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang berlarut-larut, penulis membatasi waktu antara tahun 2004-2009 yakni, selama era pemerintahan George W. Bush. Dengan alasan selama itu banyak kebijakan Amerika Serikat dalam upaya penegakan hak asasi manusia di Tibet mengikuti situasi di lingkungan dalam negeri maupun internasional.

³² *Rowell Fund Awards More 5000 Tibetan Project*, <http://www.savetibet.org/media-center/ict-press-releases/>, 9 November 2009.

³³ *Ibid.*,

Level analisa individu digunakan dalam penelitian karya ilmiah perbedaan persepsi antara Cina dan Amerika Serikat dalam permasalahan di Tibet 2008. Analisa individu dalam hal ini kepemimpinan yakni Cina di bawah kepemimpinan Hu Jintao periode (2004-2009) dan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan George W. Bush periode (2004-2009).

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah perbedaan persepsi antara Cina dan Amerika Serikat dalam permasalahan di Tibet 2008 penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

- a. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dimana penelitian menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas yang holistik, kompleks, rinci dan hipotesa melalui pengungkapan fakta.
- b. Logika penelitian yang digunakan dalam menganalisa permasalahan perbedaan persepsi antara Cina dan Amerika Serikat dalam permasalahan di Tibet 2008 adalah deduktif.
- c. Tujuan umum dari penelitian perbedaan persepsi antara Cina dan Amerika Serikat dalam permasalahan di Tibet 2008 adalah mengungkap hambatan permasalahan atas perbedaan persepsi hak asasi manusia antara keduanya dalam upaya resolusi dengan menggunakan pola deskriptif.
- d. Jenis data sekunder dipilih oleh peneliti dalam menganalisa karya ilmiah ini. Data sekunder tersebut diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan

beberapa buku pendukung dan website resmi yang bersangkutan dengan permasalahan yang ada.

- e. Data dikumpulkan dengan telaah data sekunder dari beberapa buku pendukung dan website resmi terkait perbedaan persepsi Cina dan Amerika Serikat dalam permasalahan di Tibet 2008 dengan menggunakan teori persepsi dalam menganalisa karya ilmiah tersebut.
- f. Teknik analisa data dalam penelitian berupa analisis isi.
- g. Tingkat analisis dalam karya ilmiah ini adalah reduksionis dimana Tibet sebagai unit eksplanasi lebih rendah dari unit analisa Cina dan Amerika Serikat.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

- Bab I : Memuat uraian pemahaman isi secara keseluruhan yang berisi alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar teori, hipotesa, jangkauan penelitian dan metode penelitian.
- Bab II : Memuat pembahasan mengenai sejarah konflik Tibet, bentuk tindakan represif pemerintah Cina terhadap Tibet serta upaya Cina dan Amerika Serikat dalam mencari resolusi permasalahan di Tibet 2008.

- Bab III : Memuat pembahasan mengenai pemaknaan, pemahaman dan pelaksanaan hak asasi manusia Cina di bawah kepemimpinan Hu Jintao terhadap isu kemanusiaan di Tibet 2008.
- Bab IV : Memuat pembahasan mengenai pemaknaan, pemahaman dan pelaksanaan hak asasi manusia Amerika Serikat di bawah kepemimpinan George W. Bush terhadap isu kemanusiaan di Tibet 2008.
- Bab V : Kesimpulan dan saran.